



## Dukungan Partisipasi Masyarakat dalam Pencapaian Folu Net Sink 2030 di Provinsi Lampung

*(Community Participation Support in The Achievement of Folu Net Sink 2030 in Lampung Province)*

Erni Vida Aina<sup>1</sup>, Christine Wulandari<sup>1,2\*</sup>, Samsul Bakri<sup>1,2</sup>, Indra Gumay Febryano<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Program Doktor Ilmu Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonogoro, No. 1, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35141, Indonesia

<sup>2</sup> Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonogoro, No. 1, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35141, Indonesia

### Informasi Artikel:

Submission : 15 Mei 2025  
Revised : 08 Juli 2025  
Accepted : 21 Juli 2025  
Published : 25 Agustus 2025

### \*Penulis Korespondensi:

Christine Wulandari  
<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Pertanian,  
Fakultas Pertanian, Universitas  
Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri  
Brojonogoro, No. 1, Kota Bandar  
Lampung, Lampung, 35141, Indonesia  
<sup>2</sup> Jurusan Kehutanan, Fakultas  
Pertanian, Universitas Lampung, Jl.  
Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonogoro, No.  
1, Kota Bandar Lampung, Lampung,  
35141, Indonesia  
e-mail: [christine.wulandari@fp.unila.ac.id](mailto:christine.wulandari@fp.unila.ac.id)  
Telp: +628128209075

Makila 19 (2) 2025: 250-262

DOI:  
<https://doi.org/10.30598/makila.v19i219074>



This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

Copyright © 2025 Author(s): Erni Vida Aina, Christine Wulandari, Samsul Bakri, Indra Gumay Febryano  
Journal homepage:  
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/makila>  
Journal e-mail: [makilajournal@gmail.com](mailto:makilajournal@gmail.com)

Research Article · [Open Access](#)

### ABSTRACT

*This study aims to analyze the effectiveness of community participation in supporting the achievement of FOLU Net Sink 2030 in Lampung Province. Community participation in Forest and Land Rehabilitation (FLR) is a key factor in efforts to increase carbon stocks and reduce greenhouse gas (GHG) emissions. The research uses a literature review approach. The findings indicate that community participation in the planning, implementation, and monitoring of FLR activities affects the success of these activities. The main findings suggest that active community involvement in selecting economically valuable plant species and in forest area management enhances the success of forest and land rehabilitation, thus supporting the achievement of the FOLU Net Sink 2030 target. This study provides practical contributions by highlighting the importance of community empowerment in forest management policies and ecosystem restoration. Academically, the study enriches the understanding of the relationship between community participation and climate change mitigation, as well as providing a theoretical foundation for more effective policies in the effort to achieve the FOLU Net Sink target, particularly in Lampung Province. Based on the results of this research, it is recommended that further studies be conducted to quantitatively examine the relationship between the level of community participation and the success of forest and land rehabilitation (FLR). A more in-depth analysis is also needed to explore the social, economic, and environmental factors that influence the effectiveness of community participation in supporting the achievement of FOLU Net Sink 2030.*

**KEYWORDS:** FOLU Net Sink, Forest and Land Rehabilitation, Community Participation

### INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Lampung. Partisipasi masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi kunci

utama dalam upaya meningkatkan cadangan karbon dan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Penelitian menggunakan pendekatan literatur review. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kegiatan RHL mempengaruhi keberhasilan kegiatan RHL. Temuan utama mengindikasikan bahwa keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih jenis tanaman dengan nilai ekonomi dan dalam pengelolaan kawasan hutan meningkatkan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dengan menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan pengelolaan hutan dan pemulihan ekosistem. Secara akademik, studi ini memperkaya pemahaman tentang hubungan antara partisipasi masyarakat dan mitigasi perubahan iklim, serta memberikan dasar teoritis bagi kebijakan yang lebih efektif dalam upaya pencapaian target FOLU Net Sink khususnya di Provinsi Lampung. Dari hasil penelitian ini direkomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara kuantitatif hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Analisis lebih mendalam juga diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030.

**KATA KUNCI : FOLU Net Sink, Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Partisipasi Masyarakat.**

## **PENDAHULUAN**

Kemiskinan masyarakat sekitar hutan dan kerusakan hutan adalah masalah kompleks yang berakar dalam isu sosial ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan meningkatnya kebutuhan hidup, di tengah keterbatasan lahan, memaksa masyarakat untuk mencari nafkah dengan mengubah fungsi hutan menjadi lahan pertanian dan perkebunan, yang pada akhirnya memperburuk kerusakan lingkungan. Desakan ekonomi dan terbatasnya lahan garapan menyebabkan mereka melakukan pembukaan kawasan hutan. Masyarakat tidak bisa dieliminasi karena pada kenyataannya ketergantungan masyarakat akan hutan masih relatif sangat tinggi. Upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) harus win-win solutions yaitu membangun keduanya secara proporsional. Dengan demikian, kegiatan RHL harus terintegrasi dengan upaya membangun masyarakat di sekitar hutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Salah satu kunci keberhasilan dari pendekatan win-win dalam RHL adalah sejauh mana partisipasi masyarakat dapat dioptimalkan untuk mendukung target-target lingkungan nasional, seperti FOLU Net Sink 2030.

Indonesia telah menetapkan target FOLU (*Forestry and Other Land Use*) Net Sink 2030, yaitu kondisi di mana sektor kehutanan dan penggunaan lahan mampu menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dilepaskan. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Nomor. 6618/ MENLHK-PKTL/KUH/PLA.21/10/2021 kawasan hutan di Provinsi Lampung yaitu 948.641,07 hektar atau 28,10 persen dari luas total wilayah Provinsi Lampung. Dari total luas kawasan hutan tersebut yang menjadi kewenangan provinsi seluas 541.647,15 hektar. Pada kawasan hutan yang menjadi kewenangan provinsi tersebut 86,44 persen atau seluas 468.199,80 merupakan blok pemanfaatan. Pada blok pemanfaatan ini dapat dikelola oleh masyarakat yang tergabung dalam skema perhutana sosial.

Dengan luasan kawasan hutan yang dimiliki maka Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk berkontribusi pada pencapaian target FOLU Net Sink. Untuk pencapaian target tersebut, sejumlah kebijakan pembangunan dapat mendukung dalam pencapaiannya seperti program Perhutanan Sosial. Perhutanan sosial telah diterapkan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan termasuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Pencapaian target FOLU Net sink melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan merupakan upaya untuk peningkatan cadangan karbon sekaligus penyerapan emisi karbon. Perhutanan sosial memberikan akses pengelolaan hutan bagi masyarakat sekitar melalui skema hutan kemasyarakatan, hutan desa, hutan adat, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung konservasi lingkungan.

Di Provinsi Lampung perhutanan sosial yang telah berizin sampai dengan Januari 2024 sebanyak 451 izin perhutanan sosial dengan luas 209.408,61 hektar dengan melibatkan 95.707 Kepala Keluarga. Izin Perhutanan sosial di Provinsi Lampung didominasi skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yaitu 253 izin. Selanjutnya skema kemitraan kehutanan sebanyak 163, skema Hutan Desa sebanyak 22 izin dan skema Hutan Tanaman Rakyat sebanyak 13 izin. Selain perhutanan sosial, kebijakan rehabilitasi lahan yang digalakkan oleh pemerintah daerah di Lampung, seperti kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), turut berperan penting dalam mempercepat pencapaian FOLU Net Sink 2030 dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemulihan ekosistem hutan. Namun, seberapa efektifkah partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030 di Lampung? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penting memahami bahwa efektivitas partisipasi masyarakat sangat berkaitan erat dengan tata kelola hutan yang inklusif dan pemberdayaan masyarakat sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan.

Indonesia sangat membutuhkan tata kelola hutan yang baik. Untuk mewujudkannya perlu memberikan peran yang lebih nyata kepada masyarakat setempat dalam mengelola hutan (Harly, 2023). Kajian ini fokus pada peran masyarakat dalam pencapaian FOLU Net Sink melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yaitu penanaman pohon. Masyarakat bukan hanya sebagai pelaksana proyek pemerintah, tetapi sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini akan menganalisis peran dari partisipasi masyarakat dalam pencapaian FOLU Net Sink di Provinsi Lampung. Selama ini belum ada penelitian yang khusus mencermati hubungan partisipasi masyarakat dengan pencapaian FOLU Net Sink.

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan suatu program diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan dari program tersebut. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) akan meningkatkan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan RHL dan meningkatkan keberhasilan dalam penanaman RHL (Fajri *et al.*, 2024). Menurut (Hobley, 1996) partisipasi masyarakat terdiri dari tujuh tipe yaitu partisipasi manipulasi, partisipasi pasif, partisipasi konsultasi, partisipasi insentif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif dan partisipasi inisiatif. Dalam kegiatan RHL partisipasi yang digunakan adalah tipe partisipasi interaktif. Pada partisipasi interaktif masyarakat berperan dalam upaya penguatan kelembagaan. Selain itu masyarakat juga berperan dalam mengontrol pelaksanaan keputusan yang mereka buat sehingga mereka berperan secara keseluruhan dalam proses suatu kegiatan. Lebih jauh, partisipasi masyarakat yang efektif tidak hanya dilihat dari keterlibatan mereka secara umum, tetapi juga dari peran aktif yang mereka mainkan dalam setiap tahap pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kegiatan kecil dan bersifat pasif, tetapi mencakup hampir semua aspek pengelolaan hutan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan. Masyarakat di sini adalah masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang tergabung dalam kelompok atau gabungan kelompok tani hutan. Kelompok tani hutan (KTH) atau gabungan kelompok tani (Gapoktan) hutan dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan seperti RHL. Mereka dilibatkan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan kegiatan. Salah satu peran masyarakat dalam perencanaan adalah menentukan jenis tanaman apa yang akan ditanam. Masyarakat akan menentukan jenis tanaman yang bernilai ekonomi sehingga dapat menambah penghasilan mereka dari kegiatan ini. Diharapkan masyarakat dapat berperan lebih aktif dan bahkan menjadi pelaku utama dalam proses ini. Tentu saja, hal ini harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat untuk mengelola hutan secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat berfungsi sebagai penerima manfaat dari kegiatan pengelolaan hutan tersebut (Karso, 2022).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dampak dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam mendukung pencapaian FOLU *Net Sink* di Provinsi Lampung. Masyarakat disini adalah masyarakat yang berada di sekitar dan dalam kawasan hutan. Masyarakat ini akan bertindak sebagai aktor utama dalam kegiatan RHL.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian narrative review dimana database teridir dari Google Sholar, Elsevier, dan Science Direct. Jangka waktu pemilihan artikel dalam penelitian ini dibatasi dari tahun 2008-2025, dengan kata kunci FOLU *Net Sink*, perubahan iklim, partisipasi masyarakat, rehabilitasi

hutan dan lahan, studi literatur, dan pemberdayaan masyarakat. Kriteria inklusi pada narrative review ini adalah artikel dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam bentuk full teks. Sebelum peneliti menulis hasil penelitian berdasarkan literatur yang digunakan, peneliti terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan pemilihan tema. Selanjutnya melakukan pencarian artikel melalui situs resmi dan terakreditasi yaitu Google Scholar, Elsevier, dan Science Direct. Pencarian artikel disesuaikan dengan pertanyaan penelitian dan kriteria inklusi dimana artikel yang menggunakan Bahasa Inggris akan diterjemahkan terlebih dahulu kedalam bahasa Indonesia. Langkah selanjutnya artikel dibaca oleh peneliti secara teliti kemudian dituliskan kedalam format yang telah ditentukan dengan menggunakan kaidah IMRaD (Introduction, Method, Result, and Discussion).

Studi literatur disebut juga sebagai studi pustaka bertujuan untuk mengumpulkan teori teori yang relevan dengan penelitian (Ansori & Martoyo, 2024). Studi pustaka merupakan cara yang dipakai oleh beberapa peneliti untuk mengumpulkan berbagai informasi yang sesuai dengan topik penelitian. Informasi informasi tersebut dapat berasal dari buku, laporan penelitian, artikel ilmiah, tesis, disertasi, peraturan, ensiklopedia dan sumber lainnya (Purwono, 2008). Metode ini dipilih karena dapat mengidentifikasi pengetahuan yang telah ada, mengamati tren yang berkembang, serta kekurangan dan kesenjangan yang teramati secara spesifik, sekaligus menghasilkan kesimpulan yang relevan bagi para pembuat kebijakan dan peneliti ilmiah (Mengist *et al.*, 2020). Sebagai contoh penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode ini adalah penelitian yang membandingkan Pendidikan dan Penelitian Kehutanan di Berbagai Belahan Dunia (Maryawan & Rochsas, 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan telah dibuka seluas-luasnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) di sektor kehutanan dan PP 23 Tahun 2021 tentang pengelolaan kehutanan. Dengan adanya pendekatan partisipatif akan memudahkan masyarakat dalam memahami suatu program. Bila masyarakat sudah paham tentu akan memudahkan dalam berkolaborasi untuk melaksanakan suatu program (Sari *et al.*, 2024). Kesadaran masyarakat atas pelaksanaan suatu program merupakan prasyarat untuk perencanaan partisipatif yang sukses (Kokkoris *et al.*, 2023). Bentuk dan peran partisipasi masyarakat ini pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu seiring dinamika sosial, politik, dan kebutuhan pengelolaan hutan.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan memiliki berbagai bentuk yang berkembang seiring waktu. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kepentingan dalam pengelolaan hutan, desakan masyarakat, serta adanya dinamika politik. Pada awalnya, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan hanya bertujuan untuk kepentingan pengelola, seperti menjaga keamanan hutan serta mengurangi biaya penanaman dan pemeliharaan. Seiring dengan perubahan zaman dan

kebijakan politik, peran masyarakat dalam pengelolaan hutan mulai diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, khususnya bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hutan. Sejak reformasi, konsep keterlibatan masyarakat mengalami perubahan menjadi peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan dengan cakupan yang lebih luas. Salah satu tujuannya adalah mengembangkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan mereka (Karso, 2022).

Sejalan dengan perkembangan tersebut, konsep pembangunan berbasis masyarakat mulai mendapatkan perhatian sebagai pendekatan efektif untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Model pembangunan berbasis masyarakat cukup populer di beberapa negara dan telah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Model ini menuntut partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, mulai dari proses perencanaan hingga tahap pelaksanaan (Abidin, 2023). Untuk mencapai keberhasilan program pengelolaan khususnya pengelolaan hutan diperlukan partisipasi masyarakat yang tinggi dan tepat (Daniel Sinaga *et al.*, 2022). Adanya partisipasi masyarakat mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan program sangatlah penting sehingga dapat membangun dukungan publik sekaligus mengurangi potensi konflik (Risdianto *et al.*, 2024).

Partisipasi masyarakat tidak bisa dilepaskan dari realitas di lapangan, terutama ketika masyarakat telah lama bermukim dan bergantung pada kawasan hutan. Luasnya kawasan hutan yang telah dihuni oleh masyarakat menunjukkan lemahnya pengamanan hutan oleh negara. Banyak masyarakat yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan dan bergantung pada sumber daya hutan untuk mata pencaharian mereka, yang dapat mempengaruhi ekosistem hutan. Ketergantungan masyarakat terhadap hutan tentu akan menimbulkan interaksi antara hutan dan masyarakat. Semula interaksi masih memperhatikan aspek kelestarian hutan, namun semakin banyaknya jumlah masyarakat akan semakin membuat kelestarian hutan semakin terancam (Damanik, 2019). Oleh karena itu, solusi untuk mengurangi tekanan terhadap kawasan hutan adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan. Dalam hal ini pelibatan masyarakat dalam bentuk partisipasi interaktif dimana masyarakat dilibatkan pada semua tahapan kegiatan (Hobley, 1996).

Pemerintah telah berupaya untuk mencari cara yang lebih adil yaitu dengan melibatkan masyarakat tersebut dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Ini merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan hutan dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaannya. Harapannya adalah hutan tetap terjaga keberlangsungan fungsinya sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang sudah terlanjur bermukim di dalam kawasan hutan. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh (Waskitho & Syarifuddin, 2022) bahwa untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan maka kesejahteraaannya perlu ditingkatkan melalui pemberdayaan. Kerusakan hutan yang semakin masif akan dapat dicegah dengan adanya pemberdayaan masyarakat (Adelismula & Witarto, 2020). Oleh karena itu, pemberdayaan



masyarakat sekitar hutan menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penyediaan lapangan kerja dan akses pengelolaan hutan, tetapi juga sebagai upaya untuk mengurangi angka degradasi, deforestasi, dan konflik terkait kepemilikan lahan.

Kunci keberhasilan pengelolaan sumber daya hutan ditentukan oleh kemampuan untuk memecahkan masalah sosial ekonomi masyarakat. Desakan ekonomi masyarakat sekitar hutan adalah salah satu penyebab utama kerusakan hutan (Adelismula & Witarto, 2020). Jika gagal dalam menyelesaikan masalah ekonomi masyarakat, maka upaya pengelolaan hutan juga akan mengalami kegagalan. Untuk mencapai tujuan dari pembangunan kehutanan diperlukan partisipasi atau keterlibatan masyarakat (Purwanti *et al.*, 2022). Hal inilah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan RHL saat ini. Melalui kegiatan RHL yang bersifat padat karya diharapkan disamping untuk mencapai tujuan pulihnya kawasan hutan lindung juga dapat meningkatkan penghasilan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

Tantangan sesungguhnya dari kegiatan RHL adalah membangun perilaku positif masyarakat dalam aspek kognitif, afektif, psikomotorik dan inisiatif. Ketika masyarakat sudah mempunyai ke empat aspek tersebut dalam partisipasi kegiatan RHL maka keberhasilan teknis RHL akan lebih mudah tercapai. Perbedaan cara pandang masyarakat terhadap kegiatan RHL harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya, jangan sampai masyarakat menganggap RHL adalah program pemerintah yang hanya menguntungkan pemerintah. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL terutama pada tahap pengawasan dan evaluasi masih rendah karena kegiatan ini dilaksanakan sebagai proyek yang harus diselesaikan. Dengan adanya pandangan seperti itu maka keberhasilan kegiatan RHL tidak akan maksimal (Hamidah *et al.*, 2023).

RHL harus tumbuh dari keinginan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sampai hasil tanamannya menjadi milik petani penggarapnya. Hal ini sejalan dengan proses pemberdayaan yang dilakukan secara sistematis. Proses pemberdayaan tersebut dimulai dari tahap sosialisasi program, pembentukan kelompok, pengaturan tugas, proses pelaksanaan berupa penanaman, perawatan dan perlindungan tanaman (Adelismula & Witarto, 2020). Selain itu masyarakat juga perlu dilibatkan dalam evaluasi tingkat keberhasilan RHL (Fernando, 2023).

### **Dukungan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pencapaian FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Lampung.**

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan sangat disebabkan karena masyarakat tidak terlepas dari proses pembangunan di desanya. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan biasanya disebut dengan istilah pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan sekaligus serta menjaga lingkungan tempat tinggal mereka (Kaehe *et al.*, 2019). Sejak otonomi daerah dan adanya desentralisasi, partisipasi masyarakat dalam pembangunan semakin ditingkatkan. Hal ini menyebabkan munculnya konsep pembangunan berbasis masyarakat yang bertujuan untuk

percepatan pembangunan di daerah (Ilham, 2017). Penerapan program ini di berbagai wilayah di Lampung menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat membawa dampak yang signifikan terhadap keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Lampung. Partisipasi masyarakat yaitu dengan melibatkan mereka mulai dari proses perencanaan, pemilihan jenis tanaman, dan pemeliharaan. Pentingnya melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan restorasi karena akan berdampak pada tingkat keberhasilan restorasi hutan (Indrajaya *et al.*, 2022). Untuk memastikan efektivitas program tersebut, partisipasi masyarakat juga difasilitasi melalui skema swakelola yang memberi mereka kendali langsung dalam proses pelaksanaan.

Studi kasus di beberapa daerah di Lampung menunjukkan bahwa ketika masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan hutan, hasilnya lebih positif. Misalnya, kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Masyarakat dilibatkan mulai dari penentuan lokasi penanaman, pemilihan jenis bibit, penanaman dan pemeliharaan. Dengan adanya partisipasi tersebut masyarakat akan merasa memiliki dan adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan RHL. Sebagai contoh di wilayah kerja KPH Gunung Balak, awalnya kegiatan RHL di tolak oleh masyarakat. Sejak masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan RHL, saat ini RHL di wilayah tersebut telah berhasil dan tanamannya sudah menghasilkan dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam pengelolaan hutan di tingkat tapak, diharapkan keterlibatan masyarakat lokal dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan dan manfaat dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL).

Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan RHL dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk secara langsung memilih jenis tanaman, menentukan jumlah dan pola penanaman, serta menetapkan luas dan lokasi penanaman yang akan digunakan dalam kegiatan RHL. Di Provinsi Lampung sejak tahun 2020 BPDAS WSS menerapkan pola Swakelola Tipe IV pada kegiatan RHL (Fajri *et al.*, 2024). Tipe swakelola direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah penanggung jawab anggaran dan/atau berdasarkan usulan kelompok masyarakat, dan dilaksanakan serta diawasi oleh kelompok masyarakat pelaksana swakelola. Dalam pelaksanaannya kegiatan RHL dengan swakelola tipe IV, penyelenggara kegiatan ditetapkan oleh pimpinan kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat adalah kelompok yang melaksanakan pengadaan barang/jasa yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN/APBD (Perpres No. 16, 2018). Lebih jauh lagi, pendekatan ini selaras dengan temuan lembaga internasional yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat lokal dalam kegiatan restorasi dan konservasi.

Kebijakan swakelola dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) telah berhasil mendorong tumbuhnya rasa memiliki (*sense of ownership*) di kalangan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan RHL dalam hal ini adalah kelompok tani hutan. Dengan melibatkan mereka secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan rehabilitasi, masyarakat



merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara tanaman pada kegiatan RHL. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan aktif mereka, tetapi juga memperkuat tanggungjawab mereka terhadap kegiatan RHL, sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

World Resources Institute (WRI) Indonesia menyampaikan bahwa partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan restorasi dan konservasi cenderung lebih berhasil dan berkelanjutan. Partisipasi tidak hanya berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan restorasi dan konservasi saja tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kesadaran mereka untuk mengelola lingkungan secara berkelanjutan (WRI Indonesia, 2024). Salah satu kegiatan restorasi lahan adalah Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). RHL adalah salah satu usaha untuk mengurangi laju deforestasi. Keberhasilan RHL sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat (Mukhlisa *et al.*, 2023). Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) bertujuan untuk memperbaiki, melindungi, dan menciptakan kondisi hutan dan lahan yang kondisi daya dukungnya, produktivitasnya dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan dapat berkelanjutan (KLHK, 2021).

Keterkaitan antara RHL dan target nasional juga tercermin dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang baru saja ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 untuk mengatasi isu lingkungan, perubahan iklim, dan upaya mewujudkan net-zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat memerlukan dukungan pembiayaan inovatif yang melibatkan partisipasi serta kolaborasi lembaga internasional, sektor swasta, dan masyarakat.

Bentuk konkret kontribusi sektor kehutanan terhadap agenda tersebut diantaranya adalah melalui FOLU Net Sink 2030. Salah satu sasaran dari RPJMN 2025-2029 adalah terwujudnya transformasi ekonomi hijau. Dalam sasaran tersebut terdapat indikator yang terkait dengan capaian FOLU Net Sink 2030 yaitu persentase penurunan emisi gas rumah kaca (GRK). Target indikatornya adalah pada tahun 2029 persentase penurunan emisi GRK sebesar 30,11%. Sedangkan target indikator penurunan intensitas emisi GRK pada Tahun 2029 sebesar 72,13% (*Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*, 2025). Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 17,159 jt t CO<sub>2</sub>e (KLHK, 2022). Besaran target ini tentu memerlukan komitmen bersama dalam mencapainya termasuk sektor kehutanan sebagai salah satu sektor yang berperan dalam penurunan emisi GRK melalui penanaman yaitu RHL. Penanaman adalah upaya peningkatan cadangan karbon (PCK). Hal ini berkorelasi atas peningkatan penyerapan karbon pada lokasi penanaman (Nave *et al.*, 2019). Dengan demikian, keberhasilan penurunan emisi GRK harus dilihat tidak hanya dari aspek ekologis, tetapi juga dari dimensi ekonomi dan sosial.

Penurunan intensitas emisi GRK adalah total emisi GRK dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Total emisi merupakan emisi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Angka tersebut

menunjukkan implementasi dari rencana aksi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah dalam mendukung penurunan intensitas emisi GRK. Dari nilai penurunan intensitas emisi GRK dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang positif sekaligus keberhasilan upaya untuk mengurangi emisi GRK (BAPPENAS, 2023).

Salah satu pendekatan yang terbukti efektif dalam konteks ini adalah sistem agroforestri dalam kegiatan RHL. Kegiatan RHL dengan pola agroforestri memberikan kontribusi positif dalam menyerap karbon. Hal ini dibuktikan dengan penelitian di Kabupaten Pesawaran dimana serapan karbon pada sistem agroforestri rata rata sebesar 209,64 Mg/ha dan angka ini termasuk kedalam kategori baik dalam penyerapan karbon (Natalia *et al.*, 2014). Sedangkan penelitian lain menyebutkan bahwa jumlah karbon tersimpan pada lahan agroforestri dapat mencapai 42,59 ton/ha (Irundu *et al.*, 2023). Agroforestri merupakan salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat sekitar hutan sekaligus membuka peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap hutan. Pada akhirnya akan mengatasi dampak perubahan iklim (Islam *et al.*, 2023). Lebih dari sekadar penanaman, pemulihan lahan melalui RHL memiliki dampak yang signifikan pada aksi iklim global.

Pemulihan lahan melalui kegiatan RHL memiliki peran yang penting dalam aksi mitigasi perubahan iklim. Hal ini didukung jika Tantangan Bonn mencapai tujuannya untuk memulihkan 350 juta ha, maka kegiatan RHL dapat menyerap hingga 1,7 gigaton karbon dioksida (Gt CO<sub>2</sub>) per tahun (Garrett, L. *et al.*, 2022). Keberhasilan RHL sebagai upaya peningkatan cadangan karbon berdampak langsung pada penurunan emisi dan merupakan tindakan yang signifikan dalam pencapaian target FOLU Net Sink sebagaimana agenda aksi iklim global (Widarti *et al.*, 2024). Oleh sebab itu, pemberdayaan masyarakat lokal menjadi fondasi utama bagi keberhasilan jangka panjang program-program RHL di tingkat tapak.

Pemulihan lahan kritis melalui kegiatan RHL adalah strategi yang sangat penting dalam mencapai serapan karbon pada sektor FOLU tahun 2030. Keberhasilan RHL dapat memberikan kontribusi sebagai penyerap emisi CO<sub>2</sub> (Dharmawan & Pratiwi, 2023). Kegiatan RHL yang dilaksanakan secara swakelola tentu memerlukan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan RHL. Masyarakat berpartisipasi dalam memilih jenis tanaman dan juga melakukan pemantauan terhadap tanaman sehingga tingkat keberhasilan dari RHL dapat ditingkatkan. Dengan demikian masyarakat telah berperan dalam pencapaian FOLU Net Sink 2030 di Provinsi Lampung

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Provinsi Lampung terbukti efektif dalam mendukung pencapaian target FOLU Net Sink 2030. Partisipasi masyarakat yaitu dengan melibatkan mereka dalam mulai dari proses

perencanaan, pemilihan jenis tanaman, dan pemeliharaan. Melalui pendekatan swakelola dalam kegiatan RHL tentu akan menumbuhkan rasa memiliki bagi masyarakat sehingga meningkatkan tanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL merupakan bukti bahwa masyarakat sangat berperan dalam pencapaian FOLU Net Sink di Provinsi Lampung.

Namun, penelitian ini terbatas pada pendekatan studi literatur dan tidak melibatkan data empiris langsung dari lapangan, yang bisa memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika partisipasi masyarakat di tingkat tapak. Untuk itu direkomendasikan agar dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengkaji secara kuantitatif hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL). Analisis lebih mendalam juga diperlukan untuk mengeksplorasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang mempengaruhi efektivitas partisipasi masyarakat dalam mendukung pencapaian FOLU Net Sink 2030.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. (2023). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Penerbit (Pertama)*. CV. Eureka Media Aksara.
- Adelismula, R. J., & Witarto, A. B. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pola Agroforestry Berbasis Partisipatif. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 1-16. [http://jurnal.indocakti.ac.id/index.php/eksis\\_iv/article/view/5%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106593](http://jurnal.indocakti.ac.id/index.php/eksis_iv/article/view/5%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2020.106593)
- Ansori, A., & Martoyo. (2024). Mencari Tambahan Ilmu. *Pemahaman Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(2024), 137-144.
- BAPPENAS. (2023). *Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goal (SDGs) Indonesia, Pilar Pembangunan Lingkungan*.
- Damanik, S. E. (2019). *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sekitar Kawasan Hutan (Pertama)*. Uwais Inspirasi Indonesia. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sT2-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemberdayaan+masyarakat+sekitar+hutan&ots=D17u86sIKT&sig=IyINi247DeWE\\_InY4SikSUIrTBo&redir\\_esc=y#v=onepage&q=pemberdayaan+masyarakat+sekitar+hutan&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=sT2-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=pemberdayaan+masyarakat+sekitar+hutan&ots=D17u86sIKT&sig=IyINi247DeWE_InY4SikSUIrTBo&redir_esc=y#v=onepage&q=pemberdayaan+masyarakat+sekitar+hutan&f=false)
- Daniel Sinaga, F., Yellie Memah, M., & Fany Junita Timban, J. (2022). *Community Participation In Mangrove Protected Forest Management In Sarawet Village East Likupang District North Minahasa District*. 5(September), 627-636.
- Dharmawan, I. W. S., & Pratiwi. (2023). Implementation of forest-land rehabilitation to support the enhancement of carbon stock on Indonesia's FOLU net sink 2030 strategy. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1180(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1180/1/012010>
- Fajri, A. K., Wulandari, C., Kaskoyo, H., & Bakri, S. (2024). Potensi Keberhasilan Rehabilitasi Hutan Berdasarkan Perencanaan Secara Partisipatif Di Provinsi Lampung. *Jurnal Belantara*, 7(1), 126-139. <https://doi.org/10.29303/jbl.v7i1.1019>
- Fernando, M. R. (2023). *Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Evaluasi Kegiatan Rehabilitasi Hutan Mangrove Menggunakan Analisis Multikriteria di Desa Pasar Rawa Kabupaten Langkat [Universitas Sumatera Utara]*. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/89979>

- Garrett, L.; Lévyte, H.; Besacier, C.; Alekseeva, N.; Duchelle, M. . (2022). *The key role of forest and landscape restoration in climate action*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc2510en>
- Hamidah, R. H., Adhya, I., Deni, D., Hendrayana, Y., & Supartono, T. (2023). Peran Masyarakat terhadap Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Studi di Desa Dukuhdalem, Japara, Kuningan. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 14(02), 122–134. <https://doi.org/10.25134/logika.v14i02.7843>
- Harly, L. (2023). Sustainable Forest Management from the Perspective of Customary Law in Indonesia: A Case Study in the Bayan Community. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.55681/ijssh.v1i1.324>
- Hobley, M. (1996). *Participatory forestry: the process of change in India and Nepal*. Overseas Development Institute (ODI). <https://www.cabidigitallibrary.org/doi/full/10.5555/19960612035>
- Ilham, A. (2017). Upaya Pemerintah Medorong Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Bontang Barat. *Jurnal Administrative Reform*, 1(1), 321–340.
- Irundu, D., Idris, A. I., & Sudiatmiko, P. (2023). Biomassa Dan Karbon Tersimpan Diatas Tanah Pada Hutan Rakyat Agroforestri. *Jurnal Hutan Dan Masyarakat*, 15(1), 32–41. <https://doi.org/10.24259/jhm.v15i1.26365>
- Islam, M. A., Biswas, R., Sharmin, A., Dey, T., Ashaduzzaman, M., & Partho, S. H. (2023). Sustainable livelihoods and household participation in agroforestry: a case study adjacent to the Sundarban reserve forest in Bangladesh. *GeoJournal*, 88(3), 3059–3078. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10796-0>
- Kaehe, D., Ruru, J. M., & Welson, R. Y. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Kampung Pintareng Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(80), 14–24.
- Karso, A. J. (2022). *Good Governance (I)*. Penerbit Samudra Biru.
- KLHK. (2021). Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2020. In *kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Republik Indonesia*.
- KLHK. (2022). *Rencana Kerja FOLU NET SINK 2030 Provinsi Lampung*.
- Kokkoris, I. P., Skuras, D., Maniatis, Y., & Dimopoulos, P. (2023). Natura 2000 public awareness in EU: A prerequisite for successful conservation policy. *Land Use Policy*, 125(November 2022), 106482. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2022.106482>
- Maryawan, I., & Rochsas, A. (2022). Pendidikan dan Penelitian Kehutanan di Berbagai Belahan Dunia: Sebuah Tinjauan Literatur. *Journal of Science and Applicative Technology*, 6(1), 22. <https://doi.org/10.35472/jsat.v6i1.416>
- Mengist, W., Soromessa, T., & Legese, G. (2020). Method for conducting systematic literature review and meta-analysis for environmental science research. *MethodsX*, 7, 100777. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2019.100777>
- Mukhlisa, A. N., Ashari, A. S., & Ariadi, A. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Bonto Manurung, Kabupaten Maros. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 1(5), 300–310. <https://doi.org/10.59837/jpmba.v1i5.150>
- Natalia, D., Budi Yuwono, S., & Qurniati, R. (2014). Potensi Penyerapan Karbon Pada Sistem Agroforestri Di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. *Jurnal Sylva Lestari*, 2(1), 11. <https://doi.org/10.23960/jsl1211-20>
- Nave, L. E., Walters, B. F., Hofmeister, K. L., Perry, C. H., Mishra, U., Domke, G. M., & Swanston, C. W. (2019). The role of reforestation in carbon sequestration. *New Forests*, 50(1), 115–137. <https://doi.org/10.1007/s11056-018-9655-3>

- Perpres No. 16. (2018). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*.
- Purwanti, N., Rahim, S., & Hamidun, M. S. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan (Rhl) Di Kabupaten Bone Bolango. *Jurnal Belantara*, 5(1), 72–80. <https://doi.org/10.29303/jbl.v5i1.849>
- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. *Universitas Sanata Dharma*, 6. [https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info\\_Persadha/article/view/25](https://e-journal.usd.ac.id/index.php/Info_Persadha/article/view/25)
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. (2025).
- Risdianto, A., Felix Marshal Jotham, & Nurdin. (2024). Analisis Implementasi Kebijakan “Food Estate” Dalam Upaya Perlindungan Keberlanjutan Lahan Pertanian Dan Ketahanan Pangan Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kajian Agraria Dan Kedaulatan Pangan (JKAKP)*, 3(1), 50–59. <https://doi.org/10.32734/jkakp.v3i1.14748>
- Sari, R. R., Tanika, L., Speelman, E. N., Saputra, D. D., Hakim, A. L., Rozendaal, D. M. A., Hairiah, K., & van Noordwijk, M. (2024). Farmer Options and Risks in Complex Ecological-Social systems: The FORCES game designed for agroforestry management of upper watersheds. *Agricultural Systems*, 213(October 2023). <https://doi.org/10.1016/j.agsy.2023.103782>
- Waskitho, N. T., & Syarifuddin, A. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Sekitar KHDTK UMM Dalam Konservasi Kawasan Hutan Melalui Sistem Agroforestri. *Budimas*, 04(02), 1–9.
- Widarti, A., Nurlia, A., Surati, Desmiwati, Nurjaman, R., & Bantara, I. (2024). Success story of agroforestry system for RHL: case study in Register 38 of Gunung Balak-Protected Forest, Lampung Province. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1315(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1315/1/012045>
- WRI Indonesia. (2024). *Pelibatan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan Konservasi dan Restorasi Lahan Gambut*. <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/pelibatan-masyarakat-sebagai-kunci-keberhasilan-konservasi-dan-restorasi-lahan-gambut>